

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2023**



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN

Jalan Jend. A. Yani No. 1 Telepon (021) 88961767 Fax 8895 9980
B E K A S I

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Allah SWT., yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada Kita Semua. Dan tak lupa mengucapkan Alhamdulillah, Kami Tim Penyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi yang dibentuk dengan Keputusan Walikota telah menyelesaikan Pekerjaan dalam Rangka Penyusunan RENSTRA Tahun 2024-2026.

RENSTRA sebagai Penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (*RPD*) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang diimplementasinya oleh Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (*Diskominfostandi*) Kota Bekasi, dalam kurun Waktu 3 (*tiga*) Tahun sehingga dapat mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan.

Demikian RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi telah tersusun, dan tak lupa menyampaikan terima kasih kepada semua Pihak yang telah membantu tersusunnya RENSTRA ini.

Bekasi, Februari 2023

Ketua Tim Penyusun Renstra



Drs. HUDI WIJAYANTO, M. Si

DAFTAR ISI

<i>Kata Pengantar</i>	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DISKOMINFOSTANDI KOTA BEKASI	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Diskominfo Standi Kota Bekasi.....	11
2.2 Sumber Daya Diskominfo Standi Kota Bekasi	15
2.3 Kinerja Pelayanan Diskominfo Standi Kota Bekasi	21
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Diskominfo Standi Kota Bekasi ...	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFOSTANDI KOTA BEKASI	37
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfo Standi Kota Bekasi	37
3.2 Telaah RENSTRA Kemenkominfo Tahun 2020-2024, RENSTRA Diskominfo Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan RENSTRA Diskominfo Standi Kota Bekasi Tahun 2024-2026	40
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW)	46
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFOSTANDI KOTA BEKASI	48
4.1 Tujuan dan Sasaran Diskominfo Standi Kota Bekasi.....	48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	58
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	83
BAB VIII PENUTUP	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (*RENSTRA*) Perangkat Daerah merupakan Dokumen Rencana Strategik untuk Jangka Menengah yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan sebagai Tolak Ukur Pengendalian dan Evaluasi Capaian Perangkat Daerah dalam mewujudkan Visi, melaksanakan Misi dan Program Kepala Daerah dan sebagai Bahan Perumusan Rancangan Rencana Kerja (*RENJA*) Perangkat Daerah yang berpedomanan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*). *RENSTRA* ini disusun untuk menggambarkan Wujud Pelayanan Perangkat Daerah sesuai Tugas dan Fungsi selama 3 (*tiga*) Tahun Periode.

Penyelenggaraan Pemerintahan telah berubah ke arah *Desentralisasi* yang lebih Luas, Nyata dan Bertanggung Jawab secara *Proporsional*, seiring dengan digulirkannya semangat Reformasi melalui Perubahan *Paradigma* Penyelenggaraan Pemerintahan dari “*Rule Government*” menjadi “*Good Governance*”, dari *Sentralistis (Terpusat)* ke *Desentralistis (Otonomi Daerah)*.

Perubahan tersebut memberikan Ruang yang lebih besar bagi setiap Daerah untuk melakukan Perbaikan dan Penyempurnaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Alam *Demokrasi*. Salah satu ciri dari *Demokrasi* adalah Keterbukaan Informasi Publik. *Eskalasi* Kebutuhan Informasi bagi Publik makin terasa dengan Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang demikian Pesatnya.

Dalam Tatanan Masyarakat telah terbentuk sebuah Dunia Tanpa Batas (*Borderless World*) yaitu Pola Komunikasi Masyarakat dengan Akses Komunikasi dan Informasi yang Luas dan Terbuka. Keterbukaan ini tentunya harus disikapi secara baik oleh Pemerintah dengan mengubah Pola Komunikasi *Konvensional* yang Cenderung Satu Arah menjadi Pola Komunikasi *Aktif Adaptif*

secara 2 (*dua*) Arah dengan Masyarakatnya.

Hal inilah kemudian yang mendorong terjadinya *Restrukturisasi* Organisasi yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (*Diskominfostandi*) Kota Bekasi Eksistensinya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, sebagai berikut :

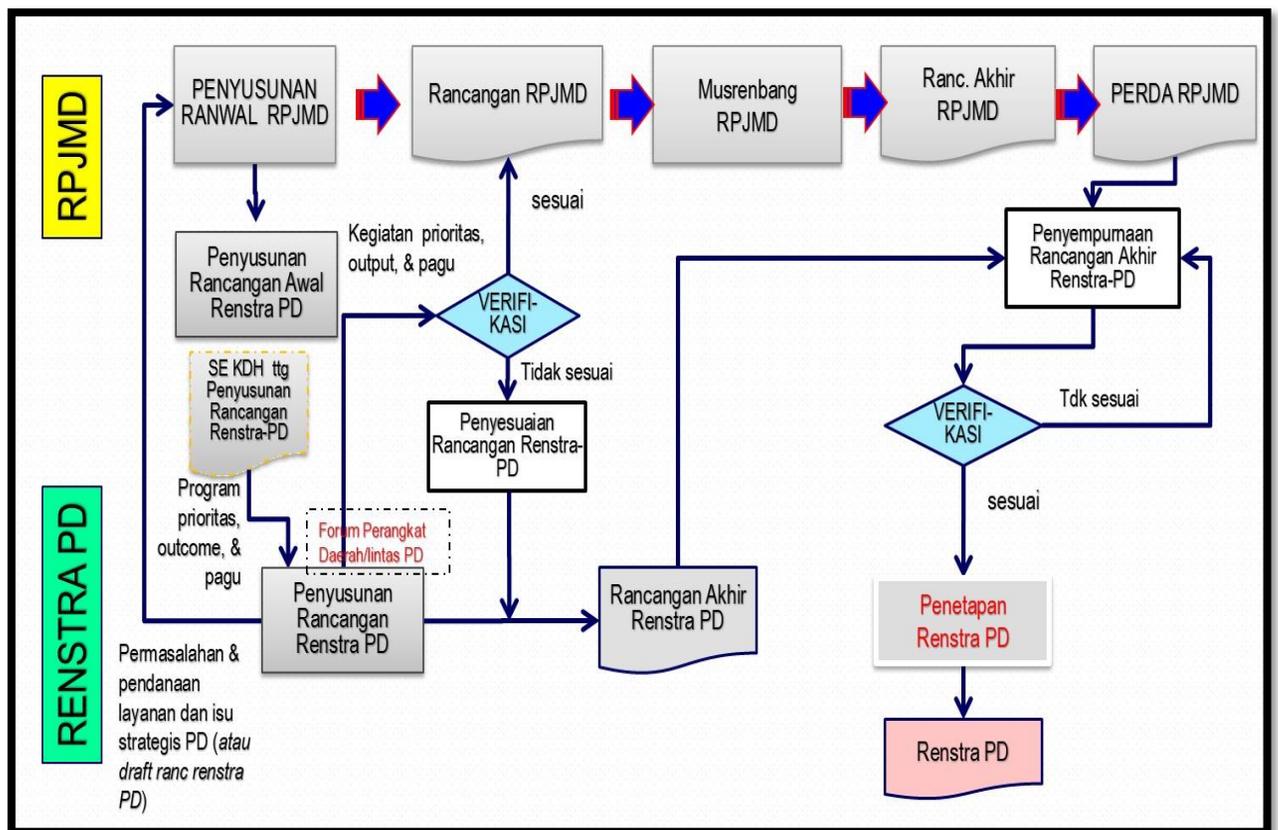
- a. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;
- b. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.

Diskominfostandi Kota Bekasi berupaya untuk memberikan Layanan-layanan Informasi berupa Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada Perangkat Daerah di Pemerintahan Kota Bekasi serta Layanan Informasi dan Komunikasi Publik bagi Masyarakat Kota Bekasi. Sehingga pada proses Penyusunan RENSTRA ini memerlukan keterlibatan dari Seluruh *Elemen* yang

terkait dan berkepentingan dengan Organisasi baik dari *Internal* maupun *Eksternal* Organisasi.

Memperhatikan Perencanaan sebagai Alat *Manajerial* untuk memelihara Keberlanjutan dan meningkatkan Kinerja Lembaga, Penyusunan RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi telah dilakukan melalui Tahapan Persiapan, Penyusunan Rancangan RENSTRA, Rancangan Akhir RENSTRA hingga Penetapan RENSTRA.

Keterkaitan serta Tahapan Penyusunan RENSTRA di Kota Bekasi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana dalam Gambar di bawah ini :

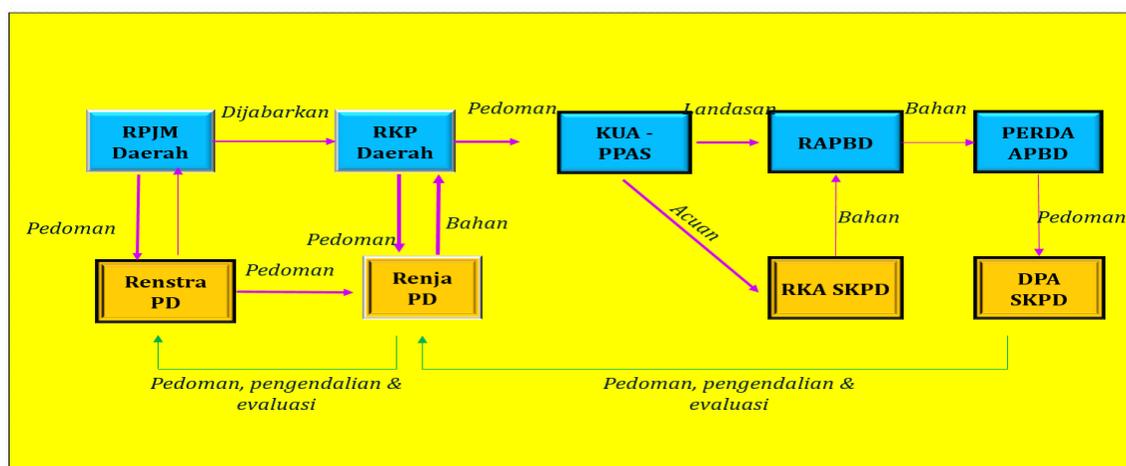


Gambar I. 1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA PD
 Sumber : Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Untuk dapat mewujudkan Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan seperti yang di Cita-citakan pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 perlu adanya Dukungan Pembangunan yang handal. Oleh karena itu, Diskominfostandi Kota Bekasi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Dari uraian Tugas Pokok tersebut, berarti Diskominfostandi Kota Bekasi Bertanggung Jawab terhadap Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian untuk Masyarakat di Kota Bekasi. Sebagai upaya untuk mengimplementasikan hal-hal diatas, maka perlu menyusun RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi yang dikenal dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Periode 2024-2026. Semoga dengan disusunnya RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024-2026 ini, diharapkan dapat memberikan Layanan-layanan Informasi berupa Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi serta Layanan Informasi dan Komunikasi Publik bagi Masyarakat Kota Bekasi.

Berikut Kedudukan RENSTRA dalam Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disajikan dalam Gambar di bawah ini :



Gambar I. 1 Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sumber : Paparan dari Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017
(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017)

Dalam Penyusunan RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Bekasi dan RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RENSTRA Kementerian Komunikasi dan Informatika. Program-program yang dipakai pada RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi disesuaikan dengan Program-program yang dilaksanakan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan RENSTRA Provinsi Jawa Barat.

RENSTRA ini juga tidak terlepas dari keterkaitannya dengan Dokumen Perencanaan lainnya seperti RTRW Kota Bekasi sebagai bagian dari Pemanfaatan Struktur dan Pola Ruang Kota Bekasi yang diarahkan oleh Dokumen RTRW Kota Bekasi dalam Perencanaan Kegiatan yang masuk dalam Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfostandi Kota Bekasi.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundangan yang menjadi Landasan Hukum disusunnya RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informasi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi;
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Kota Bekasi;
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Statistik dan Persandian Kota Bekasi;
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;

27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
28. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.705-Org/XII/2021 tentang Uraian Tugas Kelompok Substansi pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;
29. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep-16-Org/I/2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Kota Bekasi;
30. Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor : 060/752/SETDA.Org tanggal 06 Februari 2023 tentang Pelaksanaan Mekanisme Kerja Pasca Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi sebagai sebuah Dokumen Rencana yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah setiap Tahun selama 3 (*tiga*) Tahun, yang akan digunakan sebagai Acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja (*RENJA*) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (*RKA*).

b. Tujuan

1. Mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Khususnya Urusan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam Rangka menunjang Pencapaian Visi dan Misi Daerah;
3. Memantapkan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sebagai Wujud Pertanggungjawaban dalam Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan

- Kegiatan;
4. Menjadi Pedoman bagi Penyusunan RENJA dan RKA Diskominfostandi Kota Bekasi dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
 5. Untuk menjamin adanya Konsistensi Perencanaan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Diskominfostandi Kota Bekasi
- 2.2 Sumber daya Diskominfostandi Kota Bekasi
- 2.3 Kinerja Pelayanan Diskominfostandi Kota Bekasi
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Barat
- 3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfostandi Kota Bekasi

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
DISKOMINFOSTANDI KOTA BEKASI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Diskominfostandi Kota Bekasi

a. Tugas

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, Diskominfostandi Kota Bekasi memiliki Tugas yaitu Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

b. Fungsi

Selanjutnya dalam rangka menjalankan Tugas tersebut maka Diskominfostandi Kota Bekasi memiliki Fungsi sebagai berikut :

- a) Penetapan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Urusan Lingkup Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- b) Pemberian Pelayanan dan Pembinaan kepada Unsur terkait di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, serta Pelaksanaan Hubungan Kerjasama dengan Perangkat Daerah, Lembaga atau Instansi terkait dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Dinas.

c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi,

Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi terdiri atas :

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam Memimpin, Mengendalikan dan Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Fungsi Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Dinas yang meliputi Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, *e-Government* serta Statistik dan Persandian.

b) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Memimpin dan Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis Administratif Kegiatan dan Ketatausahaan yang meliputi Urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai Tata Kelola Kesekretariatan yang Baik. Sekretariat membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

c) Bidang Pengelolaan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Memimpin, Mengendalikan dan Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Dinas yang meliputi Pengelolaan Informasi Publik, Strategi Komunikasi Publik serta Layanan Komunikasi dan Informasi Publik untuk mencapai Pelaksanaan Teknis Urusan di Bidangnyanya. Bidang Pengelolaan Informasi Publik membawahkan :

1. Kelompok Jabatan Fungsional.

d) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Memimpin, Mengendalikan dan Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Dinas yang meliputi Infrastruktur

Jaringan TIK dan Telekomunikasi, Infrastruktur Layanan *Data Centre* serta Keamanan Informasi untuk mencapai Pelaksanaan Teknis Urusan di Bidanganya. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi membawahkan :

1. Kelompok Jabatan Fungsional.

e) Bidang *e-Government*

Bidang *e-Government* mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam Memimpin, Mengendalikan dan Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Dinas yang meliputi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi, Pengembangan *e-Government* serta Tata Kelola *e-Government* untuk mencapai Pelaksanaan Teknis Urusan di Bidanganya. Bidang *e-Government* membawahkan :

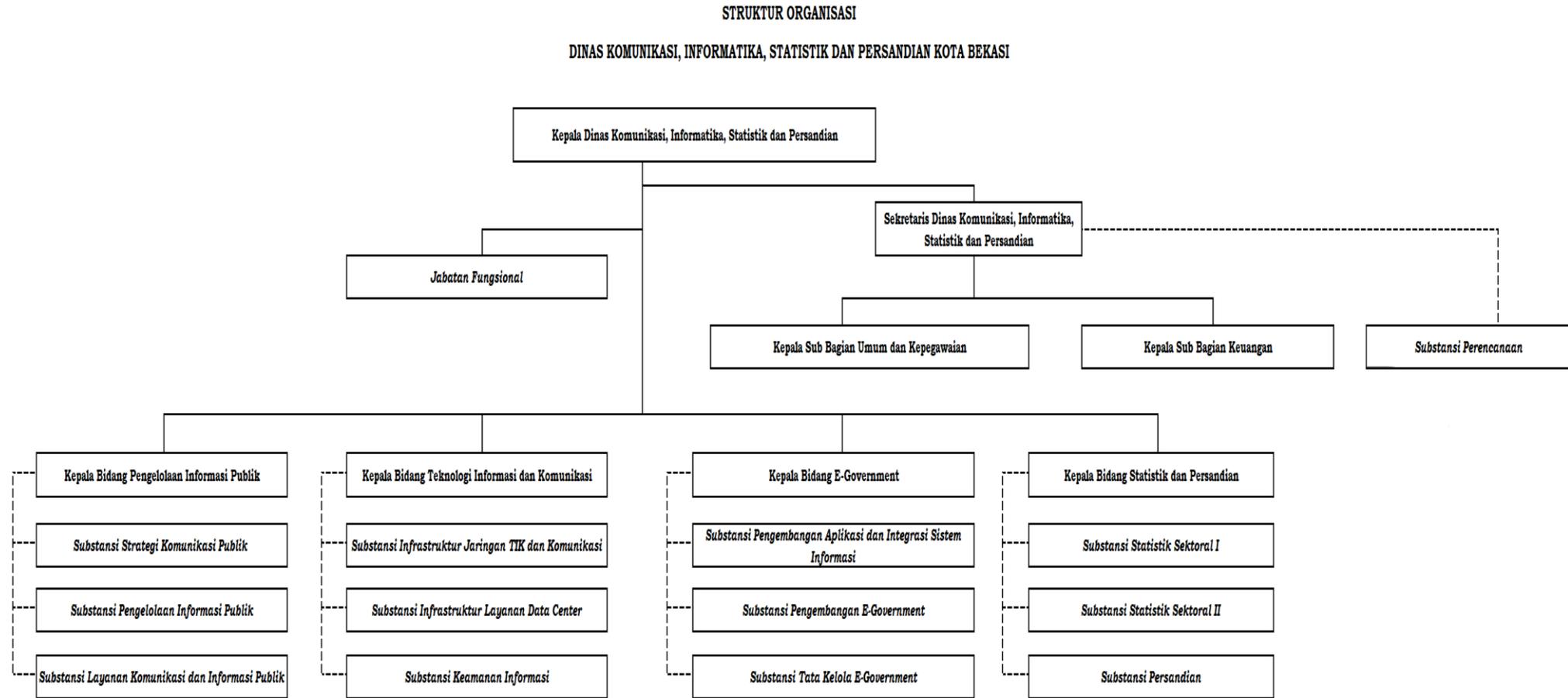
1. Kelompok Jabatan Fungsional.

f) Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Memimpin, Mengendalikan dan Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Dinas yang meliputi Statistik Sektoral I, Statistik Sektoral II serta Persandian untuk mencapai Pelaksanaan Teknis Urusan di Bidanganya. Bidang Statistik dan Persandian membawahkan :

1. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi



Gambar II. 1 Sturuktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi

Sumber : Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep-16-Org/1/2023

2.2 Sumber Daya Diskominfostandi Kota Bekasi

Sumber Daya yang dimiliki Diskominfostandi Kota Bekasi, meliputi :

a. Aparatur

Dalam menunjang Pelaksanaan Kegiatan, Diskominfostandi Kota Bekasi memiliki Pegawai sebanyak 91 (*sembilan puluh satu*) Pegawai yang terdiri dari Pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 46 (*empat puluh enam*) Pegawai dan Pegawai berstatus Tenaga Kontrak Kerja (TKK) berjumlah 45 (*empat puluh lima*) Pegawai.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Pegawai Diskominfostandi Kota Bekasi dibawah ini :

Tabel II. 1
Pegawai Diskominfostandi Kota Bekasi
Tahun 2022

No	Unit Kerja	ASN	TKK	CPNS	Jumlah
1	Sekretariat	12	9	-	21
2	Bidang Pengelolaan Informasi Publik	8	15	-	23
3	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	8	9	-	17
4	Bidang E-Government	9	7	-	16
5	Bidang Statistik dan Persandian	9	5	-	14
Jumlah		46	45	-	91

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfostandi Kota Bekasi

Untuk Pegawai yang sesuai dengan Tingkat Golongan Pegawai yang berada di Lingkungan Diskominfostandi Kota Bekasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel II. 2
Pegawai Diskominfostandi Kota Bekasi
Berdasarkan Golongan / Pangkat
Tahun 2022

No	Unit Kerja	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
1	Sekretariat	-	3	6	3	12
2	Bidang Pengelolaan Informasi Publik	-	-	4	4	8
3	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	2	4	2	8
4	Bidang E-Government	-	-	9	-	9
5	Bidang Statistik dan Persandian	-	1	7	1	9
6	CPNS	-	-	-	-	-
Jumlah		-	6	30	10	46

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfostandi Kota Bekasi

Tabel II. 3
Jumlah Pejabat Esselon pada Diskominfostandi Kota Bekasi
Tahun 2022

No	Esselonering	Jumlah
1	Eselon II b	1
2	Eselon III a	1
3	Eselon III b	4
4	Eselon IV a	2
Jumlah		8

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfostandi Kota Bekasi

Tabel II. 4
Pegawai Diskominfostandi Kota Bekasi
Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Tahun 2022

No	Pendidikan Terakhir	ASN	TKK	CPNS
1	Doktor	-	-	-
2	Magister Manajemen	7	-	-
3	Magister Akuntansi	-	-	-
4	Magister Sistem Informasi	1	-	-
5	Magister Sistem dan Teknik Transportasi	-	-	-
6	Magister Sumber Daya Manusia	-	-	-
7	Magister Ilmu Administrasi / M. Si	10	-	-

No	Pendidikan Terakhir	ASN	TKK	CPNS
8	Magister Teknik Sipil	1	-	-
9	Magister Administrasi Publik	-	-	-
10	Sarjana Hukum	-	1	-
11	Sarjana Sistem Informasi	2	7	-
12	Sarjana Administrasi Negara	-	6	-
13	Sarjana Ekonomi Manajemen	-	-	-
14	Sarjana Ekonomi	1	-	-
15	Sarjana Ilmu Politik	-	-	-
16	Sarjana Teknik Informatika	8	5	-
17	Sarjana Manajemen	2	3	-
18	Sarjanan Ilmu Pemerintahan	-	-	-
19	Sarjana Teknik Elektro	2	-	-
20	Sarjana Akuntansi	-	1	-
21	Farmasi Apoteker	1	-	-
22	Sarjana Psikologi	-	1	-
23	Sarjana Ilmu Komunikasi	-	2	-
24	Sarjana Ilmu Komputer	-	-	-
25	Sarjana Manajemen Informatika	1	-	-
26	Sarjana Sosial	1	-	-
27	Sarjana Matematika	-	1	-
28	Sarjana Pendidikan	-	1	-
29	Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota	-	1	-
30	D4 Sistem Informasi	-	1	-
31	D3 (Akuntansi)	1	-	-
32	D3 (Teknik Komputer)	-	1	-
33	D3 (Manajemen Informatika)	2	3	-
34	D3 (Teknik Elektro)	-	1	-
35	SMK	-	6	-
36	SMA	5	3	-
37	Paket C	1	1	-
Jumlah		46	45	-

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfoandi Kota Bekasi

Tabel II. 5
Rekapitulasi Jumlah ASN Dilingkungan Diskominfostandi Kota Bekasi
Berdasarkan Pendidikan dan Golongan
Tahun 2022

No	Unit Organisasi	Data Kepegawaian																															
		Menurut Tingkat Pendidikan											Menurut Golongan																				
		SD	SMP	SMA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3	JML	I				II				III				IV					JML			
													a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2	Sekretaris Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
3	Subag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
4	Subag Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
5	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
6	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
7	Kepala Bidang EGovernment	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
8	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
9	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	11	9	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	3	7	4	-	-	-	-	-	-	20	
10	Pelaksana	-	-	6	-	-	3	-	6	3	-	18	-	-	-	-	-	1	2	3	-	7	2	2	1	-	-	-	-	-	-	18	
11	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah		-	-	6	-	-	3	-	18	19	-	46	-	-	-	-	-	1	2	3	6	7	5	12	8	1	1	-	-	-	46		

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfostandi Kota Bekasi

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia telah memenuhi Syarat ataupun Klasifikasi yang sudah ditentukan sebagai Standarisasi Tingkat Pendidikan ASN di Kota Bekasi.

Secara Kuantitas Pegawai Diskominfostandi Kota Bekasi sudah cukup memadai untuk mendukung Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi, namun secara Kualitas masih diperlukan beberapa orang tambahan yang mempunyai Keahlian Khusus dan Kualifikasi Pendidikan Teknologi Informatika (*IT*) dan tidak adanya Fungsional Perencanaan untuk menciptakan *Inovasi* terbaru yang bermanfaat untuk Masyarakat Kota Bekasi.

b. Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, Diskominfostandi Kota Bekasi memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

Tabel II. 6
Sarana dan Prasarana Diskominfostandi Kota Bekasi
Tahun 2022

No.	Barang	Banyaknya	Kondisi
			Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat / Belum Ada
1	Personal Komputer	93 Unit	4 Unit Rusak
2	Printer	43 Unit	3 Unit Rusak
3	Laptop / Notebook	38 Unit	3 Unit Rusak
4	Scanner	4 Unit	Baik
5	Finger Print	2 Unit	Baik
6	Mesin Facsimile	2 Unit	Baik
7	Handphone	7 Unit	Baik
8	Mesin Ketik Elektronik	2 Unit	Baik
9	Alat Penghancur Kertas	2 Unit	Baik
10	Hand Pallet Small 3T	1 Unit	Baik
11	Krisbow Pallet Plastic 1.5T	1 Unit	Baik
12	Lemari Besi	14 Unit	Baik
13	Lemari Besi Kaca	6 Unit	Baik
14	Lemari Pakaian Kayu	1 Unit	Baik
15	Filing Kabinet	15 Unit	2 Unit Rusak
16	Rak Besi Siku	4 Unit	Baik
17	Lemari Loker	2 Unit	Baik
18	Pesawat Telephon	2 Unit	Baik
19	Kulkas	2 Unit	Baik

No.	Barang	Banyaknya	Kondisi
			Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat / Belum Ada
20	Dispenser	6 Unit	1 Unit Rusak
21	Video Drone	2 Unit	Baik
22	Proyektor / Infocus	3 Unit	Baik
23	AC Split	31 Unit	2 Rusak Berat
24	AC Unit	3 Unit	1 Unit Rusak
25	Meja Kerja Pimpinan / Kadis	1 Unit	Baik
26	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5 Unit	Baik
27	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	16 Unit	Baik
28	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	71 Unit	Baik
29	Meja Rapat	3 Unit	1 Unit Rusak
30	Meja Pantry	1 Unit	Baik
31	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2 Unit	Baik
32	Kursi Kerja Pimpinan / Kadis	1 Unit	Baik
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 Unit	Baik
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	16 Unit	Baik
35	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	62 Unit	4 Rusak
36	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	10 Unit	Baik
37	Kursi Hadap Sekdis	2 Unit	Baik
38	Kursi Rapat	23 Unit	Baik
39	Kursi Biasa (Kursi Makan / Serbaguna)	10 Unit	Baik
40	Sofa	6 Unit	Baik
41	Unitemuptible Power Supply (UPS)	20 Unit	4 Unit Rusak
42	TV Display	5 Unit	1 Unit Rusak
43	Jam Mekanis (Jam Dinding)	2 Unit	Baik
44	Sound System	2 Unit	Baik
45	Genset	1 Unit	Baik
46	Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat	9 Unit	1 Unit Rusak Berat
47	Kendaraan Dinas / Operasional Roda Dua	7 Unit	Baik
48	Tanggal Alumunium	2 Unit	Baik
49	Kichen Set	1 Unit	Baik
50	Kompom Listrik	1 Unit	Baik
51	APAR (Alat Pemadam Kebakaran)	5 Unit	Baik
52	Bracket Standing	2 Unit	Baik
53	Camcorder	1 Unit	Baik
54	Kamera	3 Unit	Baik
55	Digital Voice Recorder/Voice Recorder	2 Unit	Baik

Sumber Data : Aplikasi SIMDA BMD Versi 2.0.7 Pemerintah Kota Bekasi

c. Sarana Informasi dalam Pelayanan Publik

Dalam rangka kemudahan Informasi dan Komunikasi Publik maka Diskominfostandi Kota Bekasi telah membuka Jalur Komunikasi Publik, sebagai berikut :

Tabel II. 7
Sarana Informasi Dalam Pelayanan Publik

1.	Fitur Tanya Jawab pada kota bekasi - SP4N LAPOR : https://www.lapor.go.id - Call Center 1500 444 - LPID : ppid.bekasikota.go.id
2.	Manajemen email : koinfo@bekasikota.go.id
3.	Website : diskominfo.bekasikota.go.id
4.	Twitter : @KoinfoBekasi
5.	Instagram : diskominfobekasi
6.	sandi.standi@bekasikota.go.id

Sumber Data : Diskominfostandi Kota Bekasi

2.3 Kinerja Pelayanan Diskominfostandi Kota Bekasi

Kinerja (*Performance*) adalah Gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Pelaksanaan suatu Kegiatan / Program / Kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Organisasi yang tertuang dalam *Strategic Planning* suatu Organisasi. Sementara Pengukuran Kinerja (*Performance Measurement*) adalah suatu Proses Penilaian Kemajuan Pekerjaan terhadap Tujuan dan Sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk menganalisis Kinerja Pelayanan Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2021 digunakan Indikator Sasaran (*Indikator Kinerja Utama*).

Pada Tahun 2021 Diskominfostandi Kota Bekasi memiliki 2 (*dua*) Sasaran yang harus diwujudkan yaitu *Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (Digital Government Pemerintah Kota Bekasi)*, dengan 1 (*satu*) Indikator Kinerja Sasaran yang menjadi IKU dan Sasaran kedua yaitu *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi*, dengan 2 (*dua*) Indikator Kinerja Sasaran yang menjadi IKU, sebagai berikut :

Tabel II. 8
Capaian Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi s.d Tahun 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2021			
			Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (<i>Digital Government Pemerintah Kota Bekasi</i>)	Indeks Layanan Publik Berbasis IT	Nilai	3,99	4,01	101%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Diskominfostandi	Nilai	84,80	84,45	99,59%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (<i>AKIP</i>) Diskominfostandi	Nilai	81,17	76,06	93,70%

Sumber Data : Diskominfostandi Kota Bekasi

Secara umum pada Tahun 2021 telah disampaikan sebelumnya bahwa dari 3 (*tiga*) Indikator Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi terdapat 1 (*satu*) Indikator Sasaran yang melampaui Target yang ditetapkan dan 2 (*dua*) Indikator Sasaran yang tidak mencapai Target yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja *Indeks Layanan Publik Berbasis IT* diperoleh sebesar 101% melampaui Target yang ditetapkan, sedangkan Capaian Kinerja *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Diskominfostandi* diperoleh sebesar 99,59% tidak melampaui Target yang ditetapkan dan Capaian Kinerja *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi* diperoleh sebesar 93,70% tidak melampaui Target yang ditetapkan.

Adapun Faktor-faktor Penyebab tidak tercapai Target adalah kurangnya Sarana Prasarana untuk Publikasi pada *Platform* Media yang telah direncanakan dan Kurangnya SDM yang berkompetensi.

Untuk meningkatkan Capaian Indikator Sasaran dilakukan Alternatif Solusi, sebagai berikut :

1. Perlu adanya Sarana dan Prasarana untuk Publikasi Kegiatan Pemerintah Kota Bekasi pada *Platform* Media yang ditargetkan;
2. Dibutuhkan Tenaga Ahli yang berkompetensi.

Pencapaian Pelayanan Diskominfostandi Kota Bekasi selain mengacu kepada RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 juga mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfostandi Kota Bekasi yang dapat dilihat pada Tabel II. 9, sebagai berikut :

Tabel II. 9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfostandi Kota Bekasi

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Indeks Layanan Publik Berbasis IT	-	-	IKU	1,59	2,33	3,99	4,35	4,84	1,86	2,45	4,01	4,45	-	117%	105%	101%	102%	-
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfostandi	-	-	IKU	-	-	84,80	86,77	88,80	-	-	84,45	91,46	-	-	-	99,59%	106%	-
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	-	-	IKU	-	-	81,17	82,79	84,44	-	-	76,06	76,12	-	-	-	93,70%	92%	-

Sumber Data : LKIP 2021-2022 Diskominfostandi Kota Bekasi

Adapun untuk Pendanaan Anggaran dan Realisasi Diskominfo Standi Kota Bekasi pertahun, dalam Tabel II. 10 tersaji Anggaran dan Realisasi selama 3 (*tiga*) Tahun sebagai Pencapaian Kinerja Diskominfo Standi Kota Bekasi yakni antara Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel II. 10, sebagai berikut :

Tabel II. 10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Diskominfo Standi Kota Bekasi

No	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Belanja Operasi dan Belanja Modal	Rp.24.364.709.550	Rp.22.227.726.200	Rp.29.930.347.940	Rp.35.523.691.840	Rp.35.877.841.840	Rp.19.644.387.232	Rp.20.321.861.115	Rp.27.592.651.075	Rp.33.139.056.770	-	80,63%	91,43%	92,19%	93,29%	-

Sumber Data : Aplikasi simplerbang.bekasikota.go.id

2.3.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika statistik dan Persandian

1. Analisis SWOT

Tabel II. 11
Analisis SWOT

Faktor Internal				Faktor Eksternal			
No	Kekuatan / Strength (S)	No	Kelemahan / Weakness (W)	No	Peluang / Opportunity (O)	No	Ancaman / Threat (T)
1	Struktur Organisasi Cukup Handal dalam Merespon Kebutuhan Manajerial	1	Keterbatasan Jumlah SDM dan <i>Skill</i> yang sesuai dengan Kebutuhan	1	Era Teknologi Informasi Telekomunikasi sudah menjadi Indikator Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1	Informasi dan Komunikasi Publik sudah merupakan Kebutuhan yang Wajib dipenuhi oleh Pemerintah sehingga Berpotensi meningkatnya Komplain Masyarakat
2	Dukungan dan Komitmen Kepala Daerah dalam mewujudkan <i>E-Government</i>	2	Belum ada Perencanaan Pendanaan dari Pemerintah (<i>PD Baru</i>)	2	Semangat Daerah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Jati Diri <i>Smart City</i>	2	Perkembangan Teknologi dan Informasi yang sangat Cepat dan memerlukan Pemilihan Perangkat dan Penggunaan secara Cerdas dan Cepat
3	<i>Team Work</i> yang Kuat	3	Sistem Kerja belum Terintegrasi	3	Arus Informasi dan Aspirasi yang diberi Akses Luas akan Menguatkan Partisipasi Masyarakat	3	Keterbukaan Informasi Publik belum diimbangi dengan Budaya Masyarakat yang Bijak dalam menggunakan Perangkat Elektronik Cerdas
4	Sudah ada Kebijakan Pemerintah Daerah yang mengatur Pengembangan TIK	4	Infrastruktur IT yang tersedia masih terbatas	4	Tersedianya Aplikasi dari Pemerintah Pusat dan Bagi Pakai (<i>Sharing</i>) Aplikasi Antar Daerah	4	Masyarakat Kota Bekasi sebagai Penyangga Ibukota Negara merupakan Masyarakat <i>Heterogen</i> yang dapat berpotensi Konflik Sosial

Faktor Internal				Faktor Eksternal			
No	Kekuatan / Strength (S)	No	Kelemahan / Weakness (W)	No	Peluang / Opportunity (O)	No	Ancaman / Threat (T)
5	Kemampuan Pembiayaan	5	Belum tersedianya Sumber Data dan Pelaporan yang Kuat	5	Terbukanya Peluang dalam Berkolaborasi dengan Pebisnis (G To B)	5	Laju Pertumbuhan Penduduk menyebabkan Populasi tidak terkendali yang jika tidak diimbangi dengan Peningkatan Lapangan Kerja Baru akan memicu timbulnya Permasalahan Peningkatan Jumlah Pengangguran
6	Penggunaan Aplikasi <i>Electronic Government (e-Gov)</i> telah Membudaya dalam Pemerintahan	6	Kebutuhan Penyesuaian Program dan Kegiatan dengan segera dalam upaya mencapai Sasaran dan Target Akhir pada RPJMD yang masih Rendah	6	Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi	6	Kondisi <i>Geografis</i> , Penurunan Luas Lahan Terbuka Hijau dan Pembangunan Kota begitu pesat dapat menimbulkan Permasalahan Persampahan, Banjir dan Kemacetan

Matriks External Factors Evaluation (EFE)
Tabel II. 12 : Tabel EFE

No	Critical Success Factor	Skala (1-4)	Weight (1,0)	Adjusted Score
1	2	3	4	3x4
PELUANG				
1	Era Teknologi Informasi Telekomunikasi sudah menjadi Indikator Akuntabilitas Pemerintah Daerah	4	0,12	0,480
2	Semangat Daerah dan Masyarakat dalam mewujudkan Jati Diri <i>Smart City</i>	4	0,11	0,440

Matriks Internal Factors Evaluation (IFE)
Tabel II. 13 : Tabel IFE

No	Critical Success Factor	Skala (1-4)	Weight (1,0)	Adjusted Score
1	2	3	4	3x4
KEKUATAN				
1	Struktur Organisasi Cukup Handal dalam merespon Kebutuhan Manajerial	3	0,07	0,210
2	Dukungan dan Komitmen Kepala Daerah dalam mewujudkan <i>E-Government</i>	4	0,07	0,280

3	Arus Informasi dan Aspirasi yang diberi Akses Luas akan menguatkan Partisipasi Masyarakat	2	0,09	0,180
4	Tersedianya Aplikasi dari Pemerintah Pusat dan Bagi Pakai (<i>Sharing</i>) Aplikasi Antar Daerah	3	0,08	0,240
5	Terbukanya Peluang dalam Berkolaborasi dengan Pebisnis (<i>G To B</i>)	2	0,08	0,160
6	Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (<i>IPM</i>) Kota Bekasi	4	0,09	0,360
NILAI			0,57	1,860

3	Team Work yang Kuat	2	0,07	0,140
4	Sudah ada Kebijakan Pemerintah Daerah yang mengatur Pengembangan TIK	4	0,08	0,320
5	Kemampuan Pembiayaan	3	0,07	0,210
6	Penggunaan Aplikasi <i>Electronic Government (e-Gov)</i> telah Membudaya dalam Pemerintahan	4	0,08	0,320
NILAI			0,44	1,480

Matriks External Factors Evaluation (EFE)
Tabel II. 14 : Tabel EFE

No	Critical Success Factor	Skala (1-4)	Weight (1,0)	Adjusted Score
1	2	3	4	3x4
ANCAMAN				
1	Informasi dan Komunikasi Publik sudah merupakan Kebutuhan yang Wajib dipenuhi oleh Pemerintah sehingga Berpotensi meningkatnya Komplain Masyarakat	2	0,08	0,160
2	Perkembangan Teknologi dan Informasi yang sangat Cepat dan memerlukan Pemilihan Perangkat dan Penggunaan secara Cerdas dan Cepat	2	0,07	0,140

Matriks Internal Factors Evaluation (IFE)
Tabel II. 15 : Tabel IFE

No	Critical Success Factor	Skala (1-4)	Weight (1,0)	Adjusted Score
1	2	3	4	3x4
KELEMAHAN				
1	Keterbatasan Jumlah SDM dan <i>Skill</i> yang sesuai dengan Kebutuhan	2	0,08	0,160
2	Belum ada Perencanaan Pendanaan dari Pemerintah (<i>PD Baru</i>)	2	0,10	0,200

3	Keterbukaan Informasi Publik belum diimbangi dengan Budaya Masyarakat yang Bijak dalam menggunakan Perangkat Elektronik Cerdas	3	0,07	0,210
4	Masyarakat Kota Bekasi sebagai Penyangga Ibukota Negara merupakan Masyarakat <i>Heterogen</i> yang dapat berpotensi Konflik Sosial	2	0,07	0,140
5	Laju Pertumbuhan Penduduk menyebabkan Populasi tidak terkendali yang jika tidak diimbangi dengan Peningkatan Lapangan Kerja Baru akan memicu timbulnya Permasalahan Peningkatan Jumlah Pengangguran	2	0,07	0,140
6	Kondisi <i>Geografis</i> , Penurunan Luas Lahan Terbuka Hijau dan Pembangunan Kota begitu Pesat dapat menimbulkan Permasalahan Persampahan, Banjir dan Kemacetan	4	0,07	0,280
NILAI			0,43	1,070
TOTAL NILAI			1,00	2,930

PELUANG

Skala 4= Merupakan PELUANG berskala baik/besar
 Skala 3= Merupakan PELUANG berskala sedang
 Skala 2= Merupakan PELUANG berskala kecil

3	Sistem Kerja belum Terintegrasi	1	0,10	0,100
4	Infrastuktur IT yang tersedia masih terbatas	2	0,10	0,200
5	Belum tersedianya Sumber Data dan Pelaporan yang Kuat	3	0,10	0,300
6	Kebutuhan Penyesuaian Program dan Kegiatan dengan segera dalam upaya mencapai Sasaran dan Target Akhir pada RPJMD yang masih Rendah	2	0,08	0,160
NILAI			0,56	1,120
TOTAL NILAI			1,00	2,600

KEKUATAN

Skala 4= Merupakan kekuatan berskala baik/besar
 Skala 3= Merupakan kekuatan berskala sedang
 Skala 2= Merupakan kekuatan berskala kecil

Skala 1= Merupakan PELUANG berskala sangat kecil/tidak ada

TANTANGAN

Skala 4= Merupakan TANTANGAN berskala sangat kecil/tidak ada

Skala 3= Merupakan TANTANGAN berskala kecil

Skala 2= Merupakan TANTANGAN berskala sedang

Skala 1= Merupakan TANTANGAN berskala besar

Skala 1= Merupakan kekuatan berskala sangat kecil/tidak ada

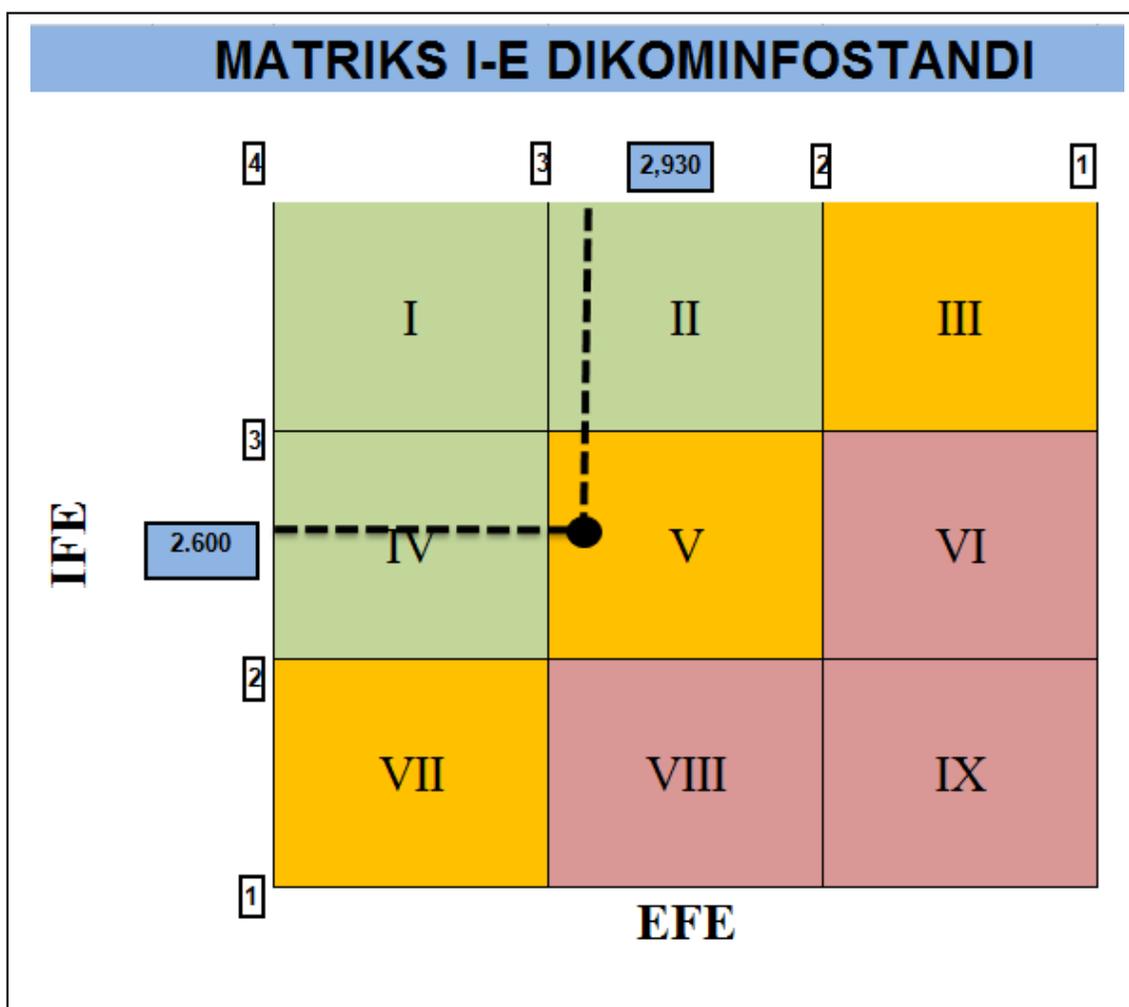
Kelemahan

Skala 4= Merupakan kelemahan berskala sangat kecil/tidak ada

Skala 3= Merupakan kelemahan berskala kecil

Skala 2= Merupakan kelemahan berskala sedang

Skala 1= Merupakan kelemahan berskala besar



Gambar II. 2 Matriks IFE dan EFE Diskominfostandi Kota Bekasi
 Sumber : Diskominfostandi Kota Bekasi

Berdasarkan Tabel di atas maka posisi Diskominfostandi Kota Bekasi berada dalam Kuadran V yang artinya dalam Posisi *Grow and Build*. Hal ini bermakna bahwa sebagai sebuah Dinas yang baru terbentuk Diskominfostandi Kota Bekasi perlu melakukan Penguatan Internal sebagai Perangkat Daerah yang memiliki Kewenangan dalam Pengembangan *e-Government* dan Infrastruktur Jaringan, Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik, serta Pengembangan Statistik dan Persandian di Kota Bekasi, dengan menerapkan berbagai Strategi, sebagai berikut :

Tabel II. 16
 Tabel Urutan Strategis Diskominfostandi Kota Bekasi

No	Urutan Strategis	Nilai
1	Implementasi Kebijakan Pengembangan TIK	6,58
2	Pembentukan Tim dan Penerapan <i>Smart City</i>	6,42
8	Pembangunan Infrastruktur IT dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Swasta	6,30

6	Penyusunan <i>Decision Support System</i> dan <i>Analytical System</i>	6,21
16	Forum Komunikasi Publik antara Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah terkait dengan Masyarakat untuk Penjaringan Aspirasi dan Pemecahan Masalah secara Interaktif	6,19
21	Penguatan Peran Tim PPID Utama, PPID Pembantu, Media Massa dan Kelompok Informasi Masyarakat dalam rangka membentuk Opini yang Positif terhadap Masyarakat	6,16
11	Penyusunan Bekasi <i>Open Government Data</i>	6,04
18	Pembangunan Sistem Informasi Analitik yang terhubung dengan <i>Smart Device</i> Berteknologi IoT dan M2M di Lokasi-lokasi Rawan Permasalahan Perkotaan	6,03
4	Kerjasama dengan Pebisnis dalam Pengembangan IT Kota Bekasi	5,92
13	Penyediaan Informasi yang Tepat dan Cepat kepada Masyarakat melalui Konsep <i>Smart City / Patriot Operation Centre</i>	5,67
14	Menyusun Konsep Pengembangan Data dan Informasi yang akan disampaikan agar sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam Pengambilan Keputusan	5,31
10	Pengadaan dan Penyiapan SDM yang sesuai dengan Kebutuhan	5,24
20	Penerapan Sistem Monitoring dan Konsistensi terhadap Hasil Evaluasi sesuai Aturan yang telah ditetapkan	5,20
19	Penyusunan Pedoman Pembangunan TIK di Kota Bekasi	5,09
3	Membangun Kerjasama dengan Pemerintah Pusat terkait Aplikasi	5,03
5	Pelibatan Masyarakat (<i>Komunitas TIK dan Akademisi</i>) dalam Penyediaan dan Akses Informasi	4,91
9	Penguatan Sistem Pelaporan menggunakan Aplikasi yang Terintegrasi	4,82
17	Penjajagan dengan Pelaku Usaha, Komunitas TIK dan KIM, serta Mitra Strategis dalam Penciptaan Lapangan Kerja Baru	4,78
12	Kerjasama antar Lembaga dalam Pengembangan <i>e-Gov</i> dan <i>Smart City</i>	4,74
7	Penyusunan Perencanaan Pendanaan Pengembangan IT	4,69
15	Sosialisasi Penggunaan Internet Sehat pada Siswa SD dan SMP	4,68
22	Pencarian Alternatif Pembiayaan Pengembangan TIK melalui CSR dan Alternatif Penguatan Infrastruktur melalui <i>Sharing Infrastructure</i> dan Kontribusi	4,53
23	Transfer Knowledge / Pelatihan menjadi Kewajiban <i>Vendor</i> Penyedia dan diatur dalam <i>Klausul Perjanjian</i>	4,46

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Diskominfostandi Kota Bekasi

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, bahwa Kelompok Sasaran Layanan Diskominfostandi Kota Bekasi, sebagai berikut :

a. Mitra Perangkat Daerah (PD) dalam Pemberian Pelayanan

Sebanyak 44 (*empat puluh empat*) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi merupakan Mitra Diskominfostandi Kota Bekasi, diantaranya dapat dilihat pada Tabel II. 17, sebagai berikut :

Tabel II. 17
Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

No.	Mitra Perangkat Daerah
1	Sekretariat Daerah Kota Bekasi
2	Sekretariat DPRD Kota Bekasi
3	Inspektorat Kota Bekasi
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
6	Badan Perencanaan Pembangunan dan penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi
8	Badan pendapatan Daerah Kota Bekasi
9	Badan kepegawaian, Pengembangan, dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bekasi
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi
12	Dinas Pendidikan Kota Bekasi
13	Dinas Kesehatan Kota Bekasi
14	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi
15	Dinas Sosial Kota Bekasi
16	Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi
17	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi
18	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi
19	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bekasi
21	Dinas Perhubungan Kota Bekasi
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi
24	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi
26	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi
27	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi
28	Dinas Tata Ruang Kota Bekasi
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi
30	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi
31	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi
32	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi
33	Kecamatan Bekasi Utara
34	Kecamatan Bekasi Timur
35	Kecamatan Bekasi Selatan

No.	Mitra Perangkat Daerah
36	Kecamatan Bekasi Barat
37	Kecamatan Rawalumbu
38	Kecamatan Mustikajaya
39	Kecamatan Bantargebang
40	Kecamatan Medan satria
41	Kecamatan Pondokgede
42	Kecamatan Jatiasih
43	Kecamatan Pondokmelati
44	Kecamatan Jatisampurna

Sumber : Diskominfostandi Kota Bekasi

b. Dukungan Kelurahan / Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) / Sekolah Dasar Negeri (SDN) / Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah (PD)

Dukungan 56 (*lima puluh enam*) Kelurahan di Wilayah Kota Bekasi sebagai Unsur Pemerintahan Kota Bekasi yang sering membantu Diskominfostandi Kota Bekasi, diantaranya dapat dilihat pada Tabel II. 18, sebagai berikut :

Tabel II. 18
Dukungan Kelurahan di Wilayah Kota Bekasi

No.	Kelurahan
1	Kel. Bekasijaya
2	Kel. Margahayu
3	Kel. Durenjaya
4	Kel. Arenjaya
5	Kel. Bintara
6	Kel. Kranji
7	Kel. Kotabaru
8	Kel. Bintarajaya
9	Kel. Jakasampurna
10	Kel. Kaliabang Tengah
11	Kel. Perwira
12	Kel. Harapanbaru
13	Kel. Teluk Pucung
14	Kel. Margamulya
15	Kel. Harapanjaya
16	Kel. Pekayonjaya
17	Kel. Margajaya
18	Kel. Jakamulya
19	Kel. Jakasetia
20	Kel. Kayuringinjaya
21	Kel. Bojong Rawalumbu
22	Kel. Pengasinan
23	Kel. Sepanjangjaya
24	Kel. Bojongmenteng
25	Kel. Medansatria
26	Kel. Harapanmulya
27	Kel. Pejuang
28	Kel. Kalibaru
29	Kel. Bantargebang
30	Kel. Cikiwul

No.	Kelurahan
31	Kel. Ciketingudik
32	Kel. Sumurbatu
33	Kel. Jatiwaringin
34	Kel. Jatibening
35	Kel. Jatimakmur
36	Kel. Jatibening Baru
37	Kel. Jaticempaka
38	Kel. Jatimekar
39	Kel. Jatiasih
40	Kel. Jatikramat
41	Kel. Jatirasa
42	Kel. Jatiluhur
43	Kel. Jatisari
44	Kel. Jatisampurna
45	Kel. Jatikarya
46	Kel. Jatiranggon
47	Kel. Jatirangga
48	Kel. Jatiraden
49	Kel. Padurenan
50	Kel. Cimuning
51	Kel. Mustikajaya
52	Kel. Mustikasari
53	Kel. Jatirahayu
54	Kel. Jatiwarna
55	Kel. Jatimelati
56	Kel. Jatimurni

Sumber : Diskominfostandi Kota Bekasi

Dukungan 45 (*empat puluh lima*) Pusat Kesehatan Masyarakat (*Puskesmas*) di Wilayah Kota Bekasi sebagai Unsur Pemerintahan Kota Bekasi yang sering membantu Diskominfostandi Kota Bekasi, diantaranya dapat dilihat pada Tabel II. 19, sebagai berikut :

Tabel II. 19
Dukungan Pusat Kesehatan Masyarakat (*Puskesmas*)
di Wilayah Kota Bekasi

No.	Puskesmas
1	Puskesmas Kaliabang Tengah
2	Puskesmas Marga Mulya
3	Puskesmas Teluk Pucung
4	Puskesmas Seroja
5	Puskesmas Harapan Baru
6	Puskesmas Jati Karya
7	Puskesmas Medan Satria
8	Puskesmas Harapan Mulya
9	Puskesmas Kalibaru
10	Puskesmas Pejuang
11	Puskesmas Kranji
12	Puskesmas Bintara Jaya
13	Puskesmas Bintara
14	Puskesmas Rawa Tembaga
15	Puskesmas Kota Baru
16	Puskesmas Jaka Setia

No.	Puskesmas
17	Puskesmas Marga Jaya
18	Puskesmas Pekayon Jaya
19	Puskesmas Jaka Mulya
20	Puskesmas Perumnas II
21	Puskesmas Bantar Gebang
22	Puskesmas Ciketing Udik
23	Puskesmas Cimuning
24	Puskesmas Sumur Batu
25	Puskesmas Mustika Sari
26	Puskesmas Bojong Menteng
27	Puskesmas Pengasinan
28	Puskesmas Bojong Rawa Lumbu
29	Puskesmas Aren Jaya
30	Puskesmas Karang Kitri
31	Puskesmas Bekasi Jaya
32	Puskesmas Duren Jaya
33	Puskesmas Mustika Jaya
34	Puskesmas Jati Warna
35	Puskesmas Jatirahayu
36	Puskesmas Jatiranggon
37	Puskesmas Jati Sampurna
38	Puskesmas Jatimekar
39	Puskesmas Jati Kramat
40	Puskesmas Jatiluhur
41	Puskesmas Jatiasih
42	Puskesmas Jatibening Baru
43	Puskesmas Jatimakmur
44	Puskesmas Jatibening
45	Puskesmas Pondok Gede

Sumber : Diskominfostandi Kota Bekasi

Dukungan 365 (*tiga ratus enam puluh lima*) Sekolah Dasar Negeri (*SDN*) di Wilayah Kota Bekasi serta 49 (*empat puluh sembilan*) Sekolah Menengah Pertama (*SMPN*) di Wilayah Kota Bekasi sebagai Unsur Pemerintahan Kota Bekasi yang sering membantu Diskominfostandi Kota Bekasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFOSTANDI KOTA BEKASI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfostandi Kota Bekasi

Tabel III. 1
Tabel Identifikasi Masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Sinkronisasi Pengembangan dan Pemanfaatan <i>e-Government</i> untuk Perluasan Aksesibilitas Informasi dan Layanan Publik	Belum Optimalnya Pemanfaatan <i>e-Government</i> dalam mendapatkan Informasi dan Layanan Publik	Rendahnya Pengetahuan tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Dampak <i>Covid-19</i> menyebabkan Aktivitas Perekonomian Masyarakat belum sepenuhnya Pulih sehingga berpengaruh terhadap Produktifitas dan Pertumbuhan ekonomi	Rendahnya Tingkat Literasi Digital mengenai Penanganan <i>Pandemi</i>
	Sinkronisasi Pengembangan dan Pemanfaatan <i>e-Government</i> untuk Perluasan Aksesibilitas Informasi dan Layanan Publik	Belum Optimalnya Penyebaran Akses Internet <i>Wi-Fi</i> Gratis di Ruang Publik	Terbatasnya Kemudahan Masyarakat Kota Bekasi dalam Mengakses Layanan dan Informasi mengenai Pemerintah Kota Bekasi melalui Terkoneksinya Jaringan Internet <i>Wi-Fi</i> Gratis di Kantor Pemerintahan, Ruang Publik dan Fasilitas Publik di Kota Bekasi (<i>Existing</i> ± 1000 Titik <i>Wi-Fi</i> Gratis)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Diseminasi dan Distribusi Informasi	Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi Publik	Belum Optimalnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi
			Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Sumber Daya Komunikasi
			Belum Optimalnya Pemanfaatan Layanan Pengaduan Masyarakat
3	Penyelenggaraan Pemerintahan melalui Pemanfaatan Teknologi Informatika dan Komunikasi	Belum Optimalnya Dukungan Infrastruktur Jaringan TIK di Kota Bekasi	Terbatasnya Ketersediaan Jaringan Fiber Optik untuk mendukung Kelancaran Akses Data dan Informasi di Kota Bekasi (<i>Existing</i> Infrastuktur FO terbangun ±22,6 km)
		Belum Optimalnya Penyediaan dan Kualitas Jaringan Telekomunikasi dan Informatika	Terbatasnya Ketersediaan Akses Jaringan Internet Berkecepatan Tinggi
		Belum Optimalnya Pemanfaatan <i>Hosting</i> dan <i>Colocation</i> pada Infrastruktur Pusat Data Pemerintah Kota Bekasi yang telah Tersertifikasi ISO 27001:2013	Belum Optimalnya Pengintegrasian Aset Data dan Pengelolaan Sistem Informasi Layanan Digital Perangkat Daerah
4	Keamanan Sistem Elektronik atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>SPBE</i>) dalam mendukung Pembentukan Ekosistem Kota Pintar (<i>Smart City</i>);	Belum Optimalnya Penanganan Keamanan Informasi Sistem Elektronik atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>SPBE</i>)	Belum Optimal Perangkat Daerah dalam Penerapan Layanan Keamanan Informasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5	Keterbatasan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Belum Optimalnya Ketersediaan Data di Perangkat Daerah	Data belum Akurat, Mutakhir, Terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan
		Belum Optimalnya Proses Pengumpulan data	Inkonsistensi Data (<i>Jangka Waktu dalam Proses Pengambilan Data</i>)

Sumber : Diskominfostandi Kota Bekasi

3.2 Telaah RENSTRA Kemenkominfo Tahun 2020-2024, RENSTRA Diskominfo Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024-2026

Tabel III. 2
**RENSTRA Kemenkominfo Tahun 2020-2024,
 RENSTRA Diskominfo Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan
 RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024-2026**

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Target Kinerja/ Lokasi	RENSTRA Kemenkominfo Tahun 2020-2024	RENSTRA Diskominfo Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024-2026
Tujuan	1. Meningkatkan Penyediaan dan Pemerataan Infrastruktur TIK berkualitas di Seluruh Wilayah Indonesia;	1. Terwujudnya Jawa Barat yang Informatif dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;	1. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi;
	2. Mendorong Percepatan Transformasi Digital di 3 Aspek, Bisnis, Masyarakat dan Pemerintahan, yang ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki Kompetensi Digital;	2. Terwujudnya Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi.	2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi.
	3. Memperkuat Transparansi Informasi Publik dan Pengelolaan Komunikasi Publik.		
Sasaran	1. Meningkatnya Cakupan Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau;	1. Terwujudnya Provinsi Jawa Barat yang Informatif;	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (<i>Digital Government Pemerintah Kota Bekasi</i>);
	2. Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital;	2. Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>SPBE</i>);	2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi.
	3. Meningkatnya Konektivitas Layanan Pos;	3. Terwujudnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;	

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Target Kinerja/ Lokasi	RENSTRA Kemenkominfo Tahun 2020-2024	RENSTRA Diskominfo Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	RENSTRA Diskominfo Standi Kota Bekasi Tahun 2024-2026
	4. Terwujudnya Konektivitas <i>Next Generation Broadband</i> Nasional;	4. Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran;	
	5. Meningkatnya Pemanfaatan <i>Spektrum Frekuensi Radio</i> dan Kualitas Pengelolaan Layanan Publik Bidang Pos, Telekomunikasi dan Informatika;	5. Terselenggaranya Persandian dan Keamanan Informasi.	
	6. Meningkatnya Pemanfaatan TIK di Sektor Ekonomi dan Bisnis;		
	7. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Digital;		
	8. Dukungan <i>Implementasi Digitalisasi</i> Pemerintah;		
	9. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;		
	10. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.		
Program	1. Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);	1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;	1. Program Informasi dan Komunikasi Publik ;
	1. Program Pengelolaan <i>Spektrum Frekuensi</i> , Standar Perangkat dan Layanan Publik;	2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;	2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
	2. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);	3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;	3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
	3. Program Komunikasi Publik;	4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;	4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
	4. Program Dukungan Manajemen.	5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Target Kinerja/ Lokasi	RENSTRA Kemenkominfo Tahun 2020-2024	RENSTRA Diskominfo Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024-2026
Target Kinerja	1. Jumlah Desa mendapatkan Layanan <i>Seluler</i> 4G di Wilayah 3T dan Non 3T (<i>Kumulatif</i>);	1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik;	1. Indeks Layanan Publik Berbasis IT;
	2. Persentase (%) Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat <i>Optik Broadband</i> *28 (<i>Kumulatif</i>);	2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>SPBE</i>);	2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (<i>AKIP</i>) Diskominfostandi.
	3. Persentase (%) Rumah Tangga terlayani Jaringan Internet Akses <i>Fixed Broadband</i> terhadap Total Rumah Tangga* (<i>Kumulatif</i>);	3. Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektor untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;	
	4. Kapasitas Penyediaan <i>Satelit Multifungsi (SATRIA1&2)</i> (<i>Gbps</i>)*;	4. Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran;	
	5. Persentase (%) Rasio Harga Layanan Jaringan <i>Mobile Broadband</i> terhadap Pendapatan per Kapita (<i>dilihat dari Rata-rata Kuota 1 GB</i>)*;	5. Indeks Keamanan Informasi (<i>Indeks KAMI</i>).	
	6. Persentase (%) Rasio Harga Layanan <i>Fixed Broadband</i> terhadap Pendapatan per Kapita (<i>pada Kecepatan up to 30 Mbps</i>)*;		
	7. Persentase (%) Jangkauan Populasi Penyiaran <i>TV Digital</i> * (<i>Kumulatif</i>);		
	8. Persentase (%) Cakupan Layanan Pos (<i>Kumulatif</i>);		
	9. Jumlah Lokasi yang terkoneksi 5G pada Tahap Awal Implementasi;		
	10. Jumlah Penambahan <i>Spektrum Frekuensi Radio</i> (<i>Kumulatif</i>);		

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Target Kinerja/ Lokasi	RENSTRA Kemenkominfo Tahun 2020-2024	RENSTRA Diskominfo Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024-2026
	11. Jumlah Penyediaan Perangkat untuk Pengembangan Infrastruktur Manajemen Spektrum Frekuensi Radio (Unit);		
	12. Persentase (%) Penyelesaian Laboratorium Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi sebagai Lab Rujukan Nasional* (Kumulatif);		
	13. Jumlah Dokumen Standar Teknis sebagai Pendukung Sertifikasi Perangkat Pos dan Informatika;		
	14. Jumlah Capaian PNBP Bidang Pos dan Informatika;		
	15. Indeks Kepuasan Publik terhadap Layanan Publik Kemenkominfo;		
	16. Persentase (%) Tingkat Adopsi Teknologi Digital Disektor Strategis dan Kawasan Prioritas (Kumulatif): a. Pertanian; b. Pariwisata; c. Logistik; d. Maritim; e. Pendidikan; f. Kesehatan.		
	17. Jumlah UMKM yang Scale Up dari Usaha Mikro dan Kecil menjadi Usaha Menengah dengan Adopsi Teknologi Digital* (Kumulatif);		

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Target Kinerja/ Lokasi	RENSTRA Kemenkominfo Tahun 2020-2024	RENSTRA Diskominfo Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	RENSTRA Diskominfo Standi Kota Bekasi Tahun 2024-2026
	18. Jumlah Penambahan <i>Unicorn</i> (Kumulatif);		
	19. Jumlah <i>Startup Digital</i> Aktif yang terbentuk (Kumulatif);		
	20. Persentase (%) Penyelenggara Sistem Elektronik yang Patuh terhadap UU ITE dan PP 71 Tahun 2019;		
	21. Persentase (%) Implementasi UU PDP (Kumulatif);		
	22. Persentase (%) Ketersediaan Riset dan Penelitian Bidang TIK;		
	23. Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Literasi Bidang TIK (Kumulatif)*;		
	24. Jumlah SDM yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital;		
	25. Jumlah penyediaan Pusat Data Nasional;		
	26. Persentase (%) Instansi yang memanfaatkan <i>Aplikasi Generik</i> yang dikembangkan secara <i>Multiplatform</i> (Kumulatif);		
	27. Jumlah Kab/Kota di Kawasan Prioritas (5 Kawasan Super Prioritas dan 1 Kawasan IKN) yang mengimplementasi <i>Smart City</i> (Kumulatif);		
	28. Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (Kumulatif);		
	29. Indeks SPBE (sesuai Penilaian MenPAN Skala 1-5);		

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Target Kinerja/ Lokasi	RENSTRA Kemenkominfo Tahun 2020-2024	RENSTRA Diskominfo Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	RENSTRA Diskominfo Kota Bekasi Tahun 2024-2026
	30. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkominfo;		
	31. Nilai Opini Laporan Keuangan Kemenkominfo menurut Kriteria;		
	32. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kemenkominfo;		
	33. Indeks Kompetensi Pegawai Kemenkominfo.		
Lokasi	Indonesia	Jawa Barat	Kota Bekasi

Dalam Penyusunan RENSTRA Diskominfo Kota Bekasi menjadi sebuah Kesatuan Perencanaan yang Utuh dengan Tetap merujuk pada RENSTRA Kemenkominfo dan RENSTRA Diskominfo Provinsi Jawa Barat sebagai Wujud Sinergitas Pembangunan Daerah.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW)

Tabel III. 3
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Diskominfostandi	Arah Lokasi Pengembangan Pelayanan Diskominfostandi
1	Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi meliputi Sistem Kabel dan Pengembangan Sistem Nirkabel;	Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi meliputi Sistem Kabel dan Pengembangan Sistem Nirkabel;	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;	Sesuai	1000 Titik Wifi Tahun 2020 : 12 Kecamatan 170 Titik Wifi Tahun 2021 : 12 Kecamatan 170 Titik Wifi Tahun 2022 : 12 Kecamatan 170 Titik Wifi Tahun 2023 : 12 Kecamatan 172 Titik Wifi
2	Pengembangan Sistem Jaringan Teknologi Informasi yang Terjangkau dan Merata di Seluruh Wilayah Kota;	Pengembangan Sistem Jaringan Teknologi Informasi yang Terjangkau dan Merata di Seluruh Wilayah Kota;	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Sesuai	Website SKPD dan Aplikasi Informasi Publik
3	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jaringan <i>Fiber Optic</i> ;	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jaringan <i>Fiber Optic</i> ;	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Sesuai	Lingkungan Wali Kota Bekasi dan SKPD (<i>Diluar Lingkungan Wali Kota Bekasi</i>),
4	Perluasan Jaringan FO di arahkan pada 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan;	Perluasan Jaringan FO di arahkan pada 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan;	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Sesuai	Kelurahan, Kecamatan, SMPN, SMAN dan Ruang Publik
5	Peningkatan Kapasitas Data Center;	Peningkatan Kapasitas Data Center;	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Sesuai	Data Center Kota Bekasi

Tabel III. 4
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Diskominfo	Arah Lokasi Pengembangan Pelayanan Diskominfo
1	Kawasan Pemukiman	Kawasan Pemukiman	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program Informasi dan Komunikasi Publik	Program Prioritas Pengembangan Informasi Faso/Fasum	Kota Bekasi
2	Kawasan Ekonomi Kreatif	Kawasan Permukiman	Program Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Informasi dan Komunikasi Publik	Program Prioritas Pengembangan Industry Kreatif Berbasis TIK	Kota Bekasi

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, telaahan RENSTRA Kemenkominfo dan RENSTRA Diskominfo Provinsi Jawa Barat, telaahan RT/RW maka Isu-Isu Strategis Diskominfo Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan melalui Pemanfaatan Teknologi Informatika dan Komunikasi;
2. Sinkronisasi Pengembangan dan Pemanfaatan *e-Government* untuk Perluasan Aksesibilitas Informasi dan Layanan Publik;
3. Diseminasi dan Distribusi Informasi;
4. Peningkatan Kemampuan SDM dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Menunjang Pelayanan Publik;
5. Keterbukaan Pemerintah Kota Bekasi melalui Ketersediaan Informasi dan Data di Kota Bekasi;
6. Keamanan Informasi *e-Government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*SPBE*) dalam mendukung Pembentukan Ekosistem Kota Pintar (*Smart City*).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFOSTANDI KOTA BEKASI

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfostandi Kota Bekasi

Tujuan dan Sasaran adalah Tahap Perumusan Sasaran Strategis yang menunjukkan Tingkat Prioritas Tertinggi dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar Penyusunan Kerangka Kinerja Perangkat Daerah selama 3 (*tiga*) Tahun.

Tujuan adalah Pernyataan tentang Hal-Hal yang diperlukan untuk memecahkan Permasalahan dan menangani Isu-Isu Strategis Daerah yang dihadapi. Sedangkan Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan yang diformulasikan secara Terukur, Spesifik, Mudah Dicapai, Rasional, untuk dapat dilaksanakan selama kurun waktu 3 (*tiga*) Tahun ke depan.

Pada tanggal 13 Februari 2023 telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi. Penyesuaian tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pembahasan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Nomor : 050/3353-BA/BAPPELITBANGDA.IPW Tanggal 10 November 2023 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Diskominfostandi Kota Bekasi mendukung pencapaian dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Dalam rangka menangani Permasalahan dan Isu Strategis Perencanaan Pembangunan Daerah, maka Diskominfostandi Kota Bekasi merumuskan 1 (*satu*) Tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan 1 : *Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi*
Indikator Tujuan 1 : *Indeks Layanan Publik Berbasis IT*
2. Tujuan 2 : *Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi*
Indikator Tujuan 2 : *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi*

Diskominfostandi Kota Bekasi merumuskan Tujuan 1 “*Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi*” dengan Indikator “*Indeks Layanan Publik Berbasis IT*”, selanjutnya Tujuan 2 “*Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi*” dengan Indikator “*Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi*” yang diukur dari Keselarasan antara Dokumen Perencanaan Pembangunan dengan Penganggaran dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Dalam rangka mencapai Tujuan 1 dan Tujuan 2 tersebut, dirumuskan Sasaran yaitu Rumusan Kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa Hasil Kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari Pencapaian Hasil

(Outcome) Program Perangkat Daerah.

Sasaran juga merupakan Penjabaran dari Tujuan yang diperoleh secara Terukur dan Nyata akan dicapai dalam setiap Tahun. Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mendukung Tujuan 1 dan Tujuan 2 adalah :

Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (*Digital Government Pemerintah Kota Bekasi*)

Indikator Sasaran 1 : Indeks Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi

Indikator Sasaran 2 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*AKIP*) Diskominfostandi

Target Tujuan dan Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024-2026 tergambar pada Tabel 4.1, sebagai berikut :

Tabel IV. 1
Tabel Tujuan dan Sasaran
Diskominfostandi Kota Bekasi
Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi;	Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (<i>Digital Government Pemerintah Kota Bekasi</i>)	Indeks Layanan Publik Berbasis IT	4,09	4,47	4,87

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi	77,50	77,65	77,75

Adapun Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 2
Formulasi Perhitungan IKU Diskominfostandi Kota Bekasi

No.	Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (Digital Government Pemerintah Kota Bekasi)	Indeks Layanan Publik Berbasis IT	Indeks (Nilai)	<p>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 - 2019;</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;</p> <p>Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Startegi Nasional Pengembangan E-Government;</p>	<p>{Nilai Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital + Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik + Nilai Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital + Nilai Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi} : 4</p> <p>Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital Nilai Rataan{(Cakupan Unit Kerja yang Terkoneksi dengan Jaringan Primer + Cakupan Layanan Informasi Pemerintahan Daerah Kepada Publik + Persentase Tingkat Layanan Infrastruktur Pusat Data) + Persentase Jumlah Platform dengan Database yang Terintegrasi + Persentase Jumlah Layanan Digital PD)} x 5 (Indeks) Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik Nilai Rataan Survey IKM (PermenPAN RB) yang dilakukan Persemester dalam 1 Tahun Anggaran x (5 Indeks) Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital : <u>Jumlah Data Sektoral pada PD Berbasis Digital</u> x 5 (Indeks) Jumlah Data Sektoral pada PD Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi {(Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi x 0,8) + (Persentase Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi dan Pemenuhan Alat Pendukung dan Utama Persandian x 0,2):100} x 5 (Indeks) =(Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi + Jumlah Indeks Kesadaran Keamanan Informasi Aparatur Pemerintah Kota Bekasi + Jumlah Audit Reviuw Standarisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi + Jumlah Sertifikasi Keamanan Informasi + Jumlah Infrastruktur Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Fasilitas Teknologi Keamanan Informasi + Jumlah Ruang yang Aman dari Kebocoran Informasi yang Berklasifikasi + Jumlah Aparatur yang Menerbitkan Sertifikasi Elektronik + Persentase Jumlah Aplikasi yang akan menggunakan Sertifikasi Elektronik (Tanda Tangan Elektronik)) + Persentase Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi dan Pemenuhan Alat Pendukung dan Utama Persandian</p>	Kepala Dinas Diskominfostandi	Diskominfostandi

No.	Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Penanggung Jawab	Sumber Data
				<p>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;</p> <p>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;</p> <p>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;</p>			

No.	Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Penanggung Jawab	Sumber Data
				<p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</p> <p>Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 120/066/Bangda tanggal 07 Januari 2019 Perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Statistik;</p> <p>Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;</p> <p>Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;</p> <p>Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;</p> <p>Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;</p>			

No.	Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Penanggung Jawab	Sumber Data
				<p>Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;</p> <p>Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi;</p> <p>Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 555/Kep.150-Diskominfostandi/III/2017 tentang Tata Kelola Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;</p> <p>Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 555.3/Kep.83-Diskominfostandi/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Kota Bekasi.</p>			

No.	Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Penanggung Jawab	Sumber Data
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfostandi	Indeks (Nilai)	<p>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendencygunaan Telematika di Indonesia;</p> <p>Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Startegi Nasional Pengembangan E-Government;</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1).</p>	<p>Hasil Survey Rumus Perhitungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - U1 s.d U9 = Unsur Pelayanan - NNR = Nilai Rata-rata - IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat -*) = Jumlah NRR IKM Tertimbang -**) = Jumlah NNR Tertimbang x 25 - NRR Per Unsur = $\frac{\text{Jumlah nilai perunsur}}{\text{Jumlah kuesioner yang terisi}}$ - NRR = NRR per unsur x 0,011 	Kepala Dinas Diskominfostandi	Diskominfostandi

No.	Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi	Nilai	Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka Peningkatan Kinerja dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilakukan Evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana Implementasi SAKIP suatu Instansi/Unit Kerja. Hasil Evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai dan Peringkat.	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai bobot dari setiap komponen AKIP. Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat : AA (>90-100) A (>80-90) BB (>70-80) B (>60-70) CC (>50-60) C (>0-30)	Kepala Dinas Diskominfostandi	Diskominfostandi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Diskominfostandi Kota Bekasi menunjukkan adanya Relevansi dan Konsistensi antar Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 berkenaan dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Diskominfostandi Kota Bekasi.

Tabel V. 1
Tabel Relevansi dan Konsistensi Terhadap Tujuan dan Sasaran RPD

Tujuan RPD	Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel		
Sasaran RPD	Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi;	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (<i>Digital Government Pemerintah Kota Bekasi</i>);	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Peningkatan Tata Kelola, Pemanfaatan IT dan Pengembangan SDM	Pengembangan Layanan Publik Berbasis IT
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi.	2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi.		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel VI. 1
Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren- canaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (<i>Digital Government Pemerintah Kota Bekasi</i>)							IK Tujuan 1 : Indeks Layanan Publik Berbasis IT	4,01	4,09		4,47		4,87		4,87			Diskominfostandi
								IK Sasaran 1 : Indeks Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	4,01	4,09		4,47		4,87		4,87			Diskominfostandi

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren- canaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	16	02			I. Program Informasi dan Komunikasi Publik	IP : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik	4,26	4,38	1.171.000.000	4,43	1.380.400.000	4,48	1.598.710.000	4,48	1.598.710.000	Bidang PIP
		2	16	02	2.01		1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	100%	100%		100%		100%		100%		Bidang PIP

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren- canaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	-	12 Dokum en	200.000.000	12 Dokum en	225.000.000	12 Dokum en	250.000.000	12 Dokum en	250.000.000	Bidang PIP
		2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	-	2 Dokum en	100.000.000	2 Dokum en	125.000.000	2 Dokum en	150.000.000	2 Dokum en	150.000.000	Bidang PIP
		2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	-	2 Dokum en	100.000.000	2 Dokum en	125.000.000	2 Dokum en	150.000.000	2 Dokum en	150.000.000	Bidang PIP

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren- canaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	-	37 Dokumen	496.000.000	37 Dokumen	580.400.000	37 Dokumen	673.710.000	37 Dokumen	673.710.000	Bidang PIP
		2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	125 Orang	75.000.000	130 Orang	100.000.000	135 Orang	125.000.000	135 Orang	125.000.000	Bidang PIP
		2	16	02	2.01	13	Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	40 Unit	200.000.000	30 Unit	225.000.000	20 Unit	250.000.000	20 Unit	250.000.000	Bidang PIP

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren- canaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	16	03			II. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	IP: Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	3,27	3,24	21.987.128.000	4,06	22.512.777.700	4,98	23.125.324.855	4,98	23.125.324.855	Bidang Egov & Bidang TIK
		2	16	03	2.02		2. Kegiatan Pengelolaan E- Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Persentase Pengelolaan Infrastruktur Jaringan TIK, Pusat Data dan Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	100%	100%		100%		100%		100%		Bidang Egov & Bidang TIK

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren- canaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	16	03	2.02	01	Penatalaksana- an dan Pengawasan e- Government dalam Penyelenggara- an Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko- ta	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksan- aan dan Pengawasan E- Government dalam Penyelenggar- aan Pemerintah- an Daerah Kabupaten/K- ota	-	3 Dokum- en	400.000.000	3 Dokum- en	400.000.000	3 Dokum- en	400.000.000	3 Dokum- en	400.000.000	Bidang Egov
		2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintah- an Daerah yang Dikelola	-	1 Unit	425.000.000	1 Unit	350.000.000	1 Unit	325.000.000	1 Unit	325.000.000	Bidang TIK

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren- canaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	-	2 Unit	300.000.000	2 Unit	350.000.000	2 Unit	400.000.000	2 Unit	400.000.000	Bidang Egov
		2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	-	11 Layanan	200.000.000	10 Layanan	200.000.000	10 Layanan	200.000.000	10 Layanan	200.000.000	Bidang Egov

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren- canaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan sesuai dengan <i>Masterplan Smart City</i>	-	6 Dokumen	280.998.000	6 Dokumen	385.647.700	6 Dokumen	490.994.855	6 Dokumen	490.994.855	Bidang Egov
		2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	-	5 Dokumen	20.161.130.000	5 Dokumen	20.607.130.000	5 Dokumen	21.089.330.000	5 Dokumen	21.089.330.000	Bidang TIK

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren- canaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	-	1 Dokum en	220.000.000	1 Dokum en	220.000.000	1 Dokum en	220.000.000	1 Dokum en	220.000.000	Bidang Egov
		2	20	02			III Program Penyelenggar aan Statistik Sektoral	Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital	3,50	3,75	350.000.000	4,38	350.000.000	5,00	350.000.000	5,00	350.000.000	Bidang Standi
		2	20	02	2.01		3. Kegiatan Penyelenggar aan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase Ketersediaan Data Sektoral pada Perangkat Daerah Berbasis Digital	100%	100%		100%		100%		100%		Bidang Standi

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren- canaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan <i>Sinkronisasi</i> Pengumpulan, Pengolahan, <i>Analisis</i> dan <i>Diseminasi</i> Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan <i>Sinkronisasi</i> Pengumpulan , Pengolahan, <i>Analisis</i> dan <i>Diseminasi</i> Data Statistik Sektoral	-	1 Dokum en	150.000.000	1 Dokum en	150.000.000	1 Dokum en	150.000.000	1 Dokum en	150.000.000	Bidang Standi
		2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	-	1 Dokum en	200.000.000	1 Dokum en	200.000.000	1 Dokum en	200.000.000	1 Dokum en	200.000.000	Bidang Standi

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren- canaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	21	02			IV Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	IP : Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	5,00	5,00	1.653.000.000	5,00	1.654.950.000	5,00	1.657.192.500	5,00	1.657.192.500	Bidang TIK & Bidang Standi
		2	21	02	2.01		4. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		Bidang TIK & Bidang Standi

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren- canaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko- ta Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah- an Daerah/ Kabupaten/K- ota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	3 Lapora- n	200.000.000	3 Lapora- n	200.000.000	3 Lapora- n	200.000.000	3 Lapora- n	200.000.000	Bidang Standi
		2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko- ta	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Mengguna- kan Layanan Keamanan Informasi	-	15 Perang- kat Daerah	1.290.000.000	15 Perang- kat Daerah	1.290.000.000	14 Perang- kat Daerah	1.290.000.000	14 Perang- kat Daerah	1.290.000.000	Bidang TIK

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren- canaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	21	02	2.02		5. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi Sandi dan Pemenuhan Alat Pendukung Utama dan Wajib Persandian	100%	100%		100%		100%		100%		
		2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	-	44 Perangkat Daerah	163.000.000	44 Perangkat Daerah	164.950.000	44 Perangkat Daerah	167.192.500	44 Perangkat Daerah	167.192.500	Bidang Standi

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren- canaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfo standi	2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfo standi							IK Tujuan 2 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfo standi	76,06	77,50			77,65		77,75		77,75		Diskominfo standi
								IK Sasaran 2 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfo standi	76,06	77,50			77,65		77,75		77,75		Diskominfo standi

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren- canaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		x	xx	01			V Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko- ta	IP: Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	17.679.750.000	100%	18.673.400.000	100%	20.172.610.000	100%	20.172.610.000	Sekretariat
		x	xx	01	2.01		6. Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren- canaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	9 Dokum en	10.000.000	9 Dokum en	10.000.000	9 Dokum en	10.000.000	9 Dokum en	10.000.000	Sekretariat
		x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	20 Lapora n	15.000.000	20 Lapora n	15.000.000	20 Lapora n	15.000.000	20 Lapora n	15.000.000	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren- canaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								IP: Optimalisasi Pengembang- an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		Sekretariat
		x	xx	01	2.02		7. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		Sekretariat
		x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	625 Orang/ Bulan	12.500.000.000	630 Orang/ Bulan	13.000.000.000	635 Orang/ Bulan	13.500.000.000	635 Orang/ Bulan	13.500.000.000	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren- canaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		x	xx	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	6 Lapora n	10.000.000	6 Lapora n	11.000.000	6 Lapora n	12.000.000	6 Lapora n	12.000.000	Sekretariat
								IP: Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		Sekretariat
		x	xx	01	2.06		8. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren- canaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera- ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera- ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	25.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	35.000.000	1 Paket	35.000.000	Sekretariat
		x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	3 Paket	300.000.000	3 Paket	320.000.000	3 Paket	350.000.000	3 Paket	350.000.000	Sekretariat
		x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	2 Paket	82.000.000	2 Paket	83.000.000	2 Paket	84.000.000	2 Paket	84.000.000	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren- canaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-	388 Dokum en	45.000.000	388 Dokum en	50.000.000	388 Dokum en	55.000.000	388 Dokum en	55.000.000	Sekretariat
		x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	36 Lapora n	10.000.000	36 Lapora n	11.000.000	36 Lapora n	12.000.000	36 Lapora n	12.000.000	Sekretariat
		x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	150 Lapora n	200.000.000	180 Lapora n	250.000.000	200 Lapora n	300.000.000	200 Lapora n	300.000.000	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren- canaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		x	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	1 Dokumen	6.750.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	Sekretariat
								IP : Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		Sekretariat
		x	xx	01	2.08		9. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren- canaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab
		3	4	5	6	7				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Lapora n	236.000.000	1 Lapora n	271.400.000	1 Lapora n	312.110.000	1 Lapora n	312.110.000	Sekretariat
		x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	2 Lapora n	3.700.000.000	2 Lapora n	4.000.000.000	2 Lapora n	4.800.000.000	2 Lapora n	4.800.000.000	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren- canaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		x	xx	01	2.09		10. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	100%		100%		100%		100%		Sekretariat
		x	xx	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	15 Unit	300.000.000	15 Unit	350.000.000	15 Unit	400.000.000	15 Unit	400.000.000	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren- canaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	80 Unit	40.000.000	85 Unit	45.000.000	72 Unit	50.000.000	72 Unit	50.000.000	Sekretariat
		x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	220.000.000	1 Unit	230.000.000	1 Unit	230.000.000	Sekretariat
Total Pagu Anggaran											42.840.878.000		44.571.527.700		46.903.837.355		46.903.837.355	Diskominfostandi

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi yang mengacu pada Tujuan Sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Tabel VII. 1
Indikator Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Ket
		Tahun 2021	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	Indeks Layanan Publik Berbasis IT	4,01	3,36	4,18	4,87	4,87	RPD	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Diskominfostandi	84,45	88,82	88,84	88,85	88,85	RPD	
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi	76,06	77,50	77,65	77,75	77,75	RPD	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik	4,26	4,38	4,43	4,48	4,48	RPD	
5	Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	3,27	3,24	4,06	4,98	4,98	RPD	
6	Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital	3,50	3,75	4,38	5,00	5,00	RPD	
7	Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	RPD	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024-2026 merupakan Dokumen Perencanaan 3 (*tiga*) Tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsinya serta berpedoman pada RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang bersifat Indikatif, yang menjadi Pedoman dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi untuk rentang waktu 3 (*tiga*) Tahun serta sebagai Acuan dan Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan.

Sehubungan dengan Implementasi RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi tahun 2024–2023, maka perlu untuk memperhatikan beberapa Kaidah Pelaksanaan diantaranya sebagai berikut :

1. Diskominfostandi Kota Bekasi berkewajiban untuk mengupayakan Pencapaian dan Pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dirumuskan dalam Dokumen RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi yang diselaraskan dengan Dokumen RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
2. Diskominfostandi Kota Bekasi berkewajiban menyusun RENJA Diskominfostandi Kota Bekasi setiap Tahun dengan berpedoman pada Dokumen Renstra Diskominfostandi Kota Bekasi dan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
3. Dalam rangka Efektifitas Pelaksanaan RENSTRA, Diskominfostandi Kota Bekasi berkewajiban melakukan Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan baik 5 (*lima*) Tahunan maupun secara berkala setiap Tahunnya.

Adapun Faktor Kunci Keberhasilan dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi khususnya terkait dengan Tujuan, Sasaran dan Program yang telah ditetapkan oleh Diskominfostandi Kota Bekasi pada

RENSTRA 2024-2026, antara lain sebagai berikut :

Meningkatkan Disiplin dan Profesionalisme Sumber Daya diantaranya sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (*SDM*) Aparatur Diskominfostandi Kota Bekasi;
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana perkantoran yang memadai;
3. Penyediaan Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Sistem dan Prosedur yang memadai;
4. Meningkatkan Kualitas Perencana dan Aparatur lainnya dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah, serta Fungsional Diskominfostandi Kota Bekasi dalam menciptakan Inovasi yang berkualitas atau bermanfaat bagi Kota Bekasi;
5. Dukungan Ketersediaan Anggaran yang memadai dalam Pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Diskominfostandi Kota Bekasi;
6. Pelayanan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfostandi Kota Bekasi secara Tanggap, Tepat, Professional dan Bermanfaat.

Pada pelaksanaannya diharapkan Dokumen RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dapat mendukung dan menjadi Pedoman dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfostandi Kota Bekasi selama 3 (*tiga*) Tahun ke depan sehingga dapat mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan.

Bekasi, Februari 2023

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian Kota Bekasi,



Drs. HUDI WIJAYANTO, M. Si

Nip. 19690121 199007 1 001